

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Berlakunya otonomi daerah dapat memberikan hak aturan bagi daerah untuk mewujudkan adanya suatu kebijakan yakni bagaimana langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Kebijakan dapat digunakan untuk menunjukan perilaku seseorang pada suatu kelompok maupun lembaga tertentu untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi.

Salah satu kebijakan yang sering kali menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah kebijakan penanganan sampah, karena saat ini sampah menjadi salah satu masalah sederhana yang hampir dihadapi oleh setiap daerah, khususnya di Indonesia. Sehingga sangat diperlukan adanya kebijakan tentang pengelolaan sampah sebagai suatu alternatif penyelesaian permasalahan tersebut. Pengelolaan sampah dimaksudkan agar sampah tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan sehingga terhindar dari adanya

pencemaran lingkungan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Namun, sampai saat ini pengelolaan sampah di Indonesia masih belum mencapai hasil yang optimal. Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah plastik di Indonesia masih belum optimal meskipun pemakaian plastik per kapita masih cukup rendah dibandingkan negara lain seperti Korea 141 kilogram per kapita dan Jepang 80 kilogram per tahun. Berdasarkan hasil survey pada Katadata Insight Center (KIC) terhadap 354 responden di lima kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, terungkap bahwa 50,8% rumah tangga yang tidak memiliki sampah, 49,2% sisa rumah tangga yang memilah sampah di Indonesia. Sementara itu, bahwa pada masyarakat dalam mengelola sampah masih kecil, sehingga harus mulai didorong melalui edukasi. (<https://m.bisnis.com> diakses pada tanggal 24 November 2021).

Permasalahan pengelolaan sampah di kota Bandung bagai mengurai benang kusut. Dimana, setiap program yang telah dikeluarkan pemerintah kota (Pemkot) Bandung sering menemukan masalah dalam pelaksanaannya. Salah satunya pada pengelolaan sampah di TPS Pasar Gedebage. Bertahun-tahun lamanya pengelolaan sampah diarea TPS Pasar Gedebage tak kunjung menemukan solusi nyata pada permasalahan tersebut. Seperti yang diungkapkan Dedi Kurniawan Ketua Badan Pengurus Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK31) Jawa Barat bahwa pengelolaan sampah di TPS Pasar Gedebage tidak berjalan optimal. Sehingga sampah organik dari

pasar dan 4 Kecamatan yang dikirim ke TPS Pasar Gedebage sering terlihat menumpuk, bahkan menggunung hingga 1-2 meter. Maka, yang dapat terhitung sekitar 10 ton sampah organik dari pasar dan warga sedangkan dari 4 Kecamatan dapat dihitung sekitar 2-3 ton sampah anorganik. Selain itu, masalah TPS Pasar Gedebage akan terus terulang jika dengan kesadaran masyarakat belum sepenuhnya mendukung adanya gerakan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan yang sering kali terjadi. (<https://www.ayobandung.com> diakses tanggal 1 Februari 2022).

Kabupaten Sumenep juga mengalami permasalahan sampah yang serius seiring dengan berkembangnya penduduk. Perkembangan ini juga diiringi dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas penduduk, yang menyebabkan terjadinya peningkatan volume pada sampah. Sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia. Setiap aktivitas manusia dapat menghasilkan sampah, yang mana jumlah sampah akan sebanding dengan adanya tingkat konsumsi terhadap material atau barang yang telah digunakan.

Data terkait banyaknya volume sampah di Kabupaten Sumenep setiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal itu berdasarkan pengiriman sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Setiap tahun volume sampah di kabupaten Sumenep ada peningkatan jumlah sampah sebagaimana diungkapkan oleh Agus Salam selaku Kepala Bidang DLH Kabupaten Sumenep, pada tahun 2018 per hari sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada kisaran 20 sampai 21 ton. Namun, sekarang meningkat, menjadi 27 hingga 28

ton per hari. (<https://m.rri.co.id> diakses tanggal 24 Desember 2021). Sedangkan pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Sumenep selama ini masih menggunakan pola tradisional, sehingga perlu adanya terobosan baru untuk memiliki nilai ekonomis.

Menurut Hairul Anwar Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Sumenep dalam Koranmadura.com menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat terobosan baru sehingga pada tumpukan sampah yang telah menumpuk dapat dimanfaatkan untuk dijadikan daur ulang. Maka dari itu, yang terus dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yakni untuk mengajak masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri. Mulai dari pengurangan volume sampah dan pemanfaatan kembali atau daur ulang. Sehingga dapat diperlukan semua pihak dalam penanganan sampah. Pengolahan sampah yang sudah dilakukan di Kabupaten Sumenep selama ini masih menggunakan pola tradisional, sehingga perlu terobosan baru untuk memiliki nilai ekonomis. Tetapi, jika sampah dikelola dengan baik, maka sampah rumah tangga dapat dijadikan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Seperti halnya membersihkan sampah bukan sekedar dibuang dan dibakar seperti yang dilakukan selama ini. (<https://www.koranmadura.com> diakses tanggal 26 Desember 2021).

Pemerintah Kabupaten Sumenep membuat kebijakan yang mengatur tentang permasalahan pengelolaan sampah. Kebijakan ini berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 83 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sumenep dalam Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan

Sampah Sejenis Rumah Tangga. Dengan adanya kebijakan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang telah memberikan sosialisasi dan memberikan bantuan berupa bak sampah kepada desa untuk menerapkan peraturan daerah yang telah ditetapkan, salah satunya di Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget.

Berdasarkan hasil data analisis penelitian Ahmad Hafid Yulianto (2019) di Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget, bahwa 1 plastik sedang yang mencapai angka 69,7%, 2 plastik sedang mencapai angka 24,2%, 3 plastik sedang mencapai angka 3,0%, satu bak sampah mencapai 3,0%. Berdasarkan hasil data analisis tersebut, persentase yang paling tinggi terdapat pada 1 sampah plastik sedang, hal ini dikarenakan penggunaan barang-barang plastik yang semakin meningkat oleh masyarakat sehingga mengakibatkan lingkungan akan tercemar.

Permasalahan sampah yang terjadi di Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget yakni dengan minimnya tempat pembuangan sampah (TPA) sehingga banyak sampah yang tertimbun dan menggenang. Selain itu, dipicu kurangnya kesadaran pada masyarakat Desa Pinggir Papas dalam pengelolaan sampah, seperti halnya Desa Pinggir Papas tidak mau mendaur ulang hasil sampah yang diproduksi atau tidak bisa memisahkan sampah menurut jenisnya misalnya sampah organik dan non organik. Hal tersebut dapat mengakibatkan tumpukan sampah dan tidak memberikan kenyamanan bagi

warga sekitar akibat bau sampah yang tidak sedap karena banyaknya sampah yang menumpuk.

Berdasarkan permasalahan dan fakta diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sumenep dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis rumah Tangga Studi di Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu “Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sumenep dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah tangga Studi di Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dari rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yakni: untuk menjelaskan Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah tangga Untuk Mengolah Sampah di Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dituangkan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Manfaat Teoritik

Secara teoritik manfaat penelitian ialah memberikan manfaat secara langsung dalam kesepakatan dalam kepustakaan dalam upaya menambah teori dan juga ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktik

1) Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui peran-peran penting dalam proses adanya kebijakan dalam Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sumenep sendiri. selain itu, peneliti juga dapat memiliki wawasan yang lebih luas sebagaimana cara mengimplementasikan adanya suatu kebijakan yang telah dibuat.

2) Bagi Instansi

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah yang ada yaitu memberikan wawasan baru tentang strategi yang dapat digunakan untuk pengelolaan sampah di Desa Pinggir Papis Kecamatan kaliangget.

3) Bagi Masyarakat

Sebagai informasi bagi masyarakat terkait dengan adanya Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Kabupaten Sumenep Dalam Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

1.5 Sistematika Penulisan

- a. Bab I Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- b. Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori, Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang relevan bagi penelitian penulis juga memuat grand theory yang akan diterapkan sebagai pegangan dalam penelitian penulis. Selain itu pada bab ini juga berisi kebaruan yang harus dicantumkan oleh penulis sehingga bisa dikatakan berbeda dengan penelitian terdahulu.
- c. Bab III Metodologi Penelitian, Bab ini menjadi instrument penting bagi penulis guna memiliki pegangan dalam proses penelitian ilmiah. Pada bab ini nantinya akan dijelaskan lokasi dan waktu penelitian. Jenis penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, alat dan bahan penelitian, metode penelitian data, dan analisis data.
- d. Bab IV Gambaran Umum Objek Penelitian, pada Bab ini peneliti mendeskripsikan tentang gambaran umum objek yang akan di teliti. Peneliti akan menjabarkan Desa Pinggir papas di mulai dari sejarah singkat Desa Pinggir papas, visi dan misi, struktur organisasi, dan jumlah penduduk Desa Pinggir papas.
- e. Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian berupa data-data yang diperoleh sekaligus melakukan analisis atas data tersebut dengan menggunakan teknik analisa data dan

kerangka teori dan Bab V juga akan menguraikan tentang temuan-temuan yang telah ditemukan.

- f. Bab IV Penutup, pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

